

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Transportasi merupakan salah satu faktor penting dan menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat, karena transportasi sebagai kebutuhan turunan yang timbul akibat adanya permintaan akan komoditi atau jasa lain (Bagus & Al, 2015). Fungsi transportasi dalam aktifitas masyarakat memiliki peranan penting yang berpengaruh di dalam segala aspek atau sektor kehidupan. Salah satu tugas Pemerintah harus menyediakan pelayanan angkutan umum yang baik, efektif dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Sesuai Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 139 ayat (3) "pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ barang dalam wilayah Kabupaten/ kota". Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Lampung Selatan wajib menyediakan angkutan umum yang layak untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam beraktivitas.

Diperlukan sistem transportasi yang baik serta landasan hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan angkutan umum tersebut. Hal ini kemudian didukung oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 pasal 145 ayat (2) yang menjelaskan bahwa "penyusunan rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek". Kemudian pada pasal 148 huruf (c) berbunyi "Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum ditetapkan oleh bupati/ walikota untuk jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum perkotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/ kota". Dengan adanya sarana angkutan umum yang efektif tentu akan memudahkan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Angkutan umum yang memadai menjadi salah satu solusi pemecahan masalah yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Bedasarkan data sekunder yang diperoleh Tim PKL Kabupaten Lampung Selatan, dimana penyelenggaraan angkutan umum pedesaan di Kabupaten Lampung Selatan belum memiliki landasan hukum. Hal ini diketahui bahwa belum terdapat SK Trayek yang mengatur mengenai penyelenggaraan angkutan umum pedesaan di Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu berdasarkan data Tim PKL Kabupaten Lampung selatan tingkat penggunaan kendaraan pribadi masih sangat tinggi yaitu sebesar 88,4%, sedangkan tingkat pengguna angkutan umum di Kabupaten Lampung Selatan hanya 4%. Dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, terdapat 10 kecamatan yang belum terlayani oleh angkutan umum pedesaan. Kemudian berdasarkan kondisi eksisting, dari 7 trayek angkutan pedesaan, terdapat 4 trayek yang berakhir di zona eksternal wilayah kajian yaitu Kota Bandar Lampung, sehingga membuat status angkutan menjadi tidak jelas.

Kabupaten Lampung Selatan memiliki 7 trayek angkutan pedesaan. Dari 7 trayek angkutan pedesaan terdapat 2 trayek yang memiliki tumpang tindih berada diatas standar SPM LLAJ yaitu kurang dari 50%. Trayek tersebut yaitu trayek 04 (Patok – Kalianda) dan 05 (Tanjungan – Panjang). Selain itu dari 7 trayek angkutan pedesaan di Kabupaten Lampung Selatan yang beroperasi, seluruhnya tidak mempunyai load factor yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh SPM LLAJ yaitu sebesar 70% dari kapasitas angkutan umum.

Berdasarkan keadaan tersebut, maka diperlukan adanya kajian untuk mengevaluasi jaringan angkutan pedesaan tersebut. Sehingga angkutan umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pergerakan guna meningkatkan kemajuan wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“PERENCANAAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, terdapat 10 kecamatan yang belum terlayani oleh angkutan umum pedesaan. Kecamatan yang belum terlayani oleh jaringan trayek angkutan umum pedesaan kondisi eksisting yaitu : (Kecamatan Candipuro, Jatiagung, Ketapang, Merbau Mataram, Palas, Rajabasa, Sragi, Tanjung Bintang, Tanjung Sari dan way sulan). Hal tersebut menunjukkan belum meratanya pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pengguna angkutan umum yaitu hanya 4% dibandingkan dengan pengguna kendaraan pribadi yang mencapai 88%. Dengan kondisi tersebut menyebabkan kemacetan di beberapa jalan di Kabupaten Lampung Selatan terutama pada saat jam sibuk pagi dan sore hari.
3. Dari 7 trayek angkutan pedesaan kondisi eksisting di Kabupaten Lampung Selatan, terdapat 4 trayek yang berakhir tidak sesuai dengan batas administrasi wilayah, yang menyebabkan bersinggungan dengan trayek Angkutan Perkotaan di Kota Bandar Lampung.
4. Dari 7 trayek yang beroperasi, terdapat 2 trayek yang mengalami tumpang tindih di atas batas toleransi yaitu 50% berdasarkan SPM LLAJ.
5. Rata-rata *load factor* yang rendah dari seluruh trayek angkutan pedesaan yaitu 14%, dimana seluruh trayek tidak memenuhi standar *load factor* yaitu 70% berdasarkan SPM LLAJ.

## 1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka didapatkan rumusan masalah dalam jaringan trayek ini yang meliputi:

1. Bagaimana kinerja trayek angkutan pedesaan di Kabupaten Lampung Selatan yang dioperasikan saat ini?
2. Berapa jumlah permintaan angkutan umum pedesaan di Kabupaten Lampung Selatan?

3. Bagaimana Penentuan rute angkutan umum pedesaan yang akan direncanakan di Kabupaten Lampung Selatan?
4. Bagaimana kinerja operasional dan kinerja jaringan trayek rencana angkutan pedesaan di Kabupaten Lampung Selatan?

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengidentifikasi kinerja angkutan pedesaan di Kabupaten Lampung Selatan yang dioperasikan saat ini.
2. Mengidentifikasi Jumlah Permintaan Angkutan umum Pedesaan di Kabupaten Lampung Selatan.
3. Menentukan Rute dan Pola Operasi angkutan umum Pedesaan yang akan direncanakan berdasarkan permintaan di Kabupaten Lampung Selatan.
4. Menganalisis kinerja operasional dan jaringan angkutan pedesaan usulan di Kabupaten Lampung Selatan.

#### **1.5 Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup yang Akan dibahas dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

1. Wilayah studi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Mengevaluasi kinerja jaringan dan kinerja operasional angkutan pedesaan di Kabupaten Lampung Selatan yang dioperasikan saat ini.
3. Perencanaan jaringan trayek angkutan umum pedesaan di kabupaten Lampung Selatan meliputi : jumlah permintaan, penentuan rute, jenis kendaraan, kinerja operasional dan kinerja jaringan;
4. Mengusulkan jaringan trayek angkutan pedesaan baru berdasarkan potensi permintaan pengguna jasa akibat adanya bangkitan dan tarikan perjalanan.
5. Tidak membahas mengenai penjadwalan angkutan pedesaan.